

Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Stabilitas Perbankan dan Perekonomian Indonesia (Studi Kasus : Analisis Kebijakan Moneter dan Fiskal Tahun 2025)

Saskia Nailatus Salma

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

saskiasalma241@gmail.com

ABSTRACT

The depreciation of the Indonesian Rupiah against the US Dollar in 2025 has become a major concern in the national economy. The exchange rate, which reached Rp16,640 per USD, reflects significant pressure on Indonesia's macroeconomic stability. This situation has triggered various impacts, including increased import costs, weaker purchasing power, and rising risks in the banking sector. This study aims to analyze the effects of Rupiah depreciation on banking stability and evaluate the fiscal and monetary policy responses taken throughout the year. The research relies on secondary data from credible sources such as Bank Indonesia, the Financial Services Authority (OJK), the Central Statistics Agency (BPS), and the Ministry of Finance. Key indicators include Bank Indonesia's interest rate (BI-Rate) held at 5.75%, the Non-Performing Loan (NPL) ratio at 2.18%, and a strong Capital Adequacy Ratio (CAR) of 24.86%. The findings indicate that, while the Indonesian banking sector remains fundamentally stable, there are concerns about liquidity and credit risks. Monetary policy, including currency market interventions and interest rate decisions, has helped maintain short-term stability. Meanwhile, fiscal policy has focused on supporting household consumption through social spending and subsidies. The study concludes that synchronizing fiscal and monetary strategies is crucial to maintain economic resilience amid global uncertainties.

Keywords: *Exchange Rate, Rupiah, Banking Stability, Fiscal Policy, Monetary Response.*

PENDAHULUAN

Stabilitas nilai tukar merupakan elemen kunci dalam menjaga keseimbangan ekonomi makro suatu negara. Di Indonesia, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menjadi indikator vital karena mempengaruhi inflasi, arus modal, cadangan devisa, serta daya beli masyarakat. Sepanjang triwulan pertama tahun 2025, nilai tukar Rupiah sempat mencapai Rp16.640 per USD, angka terlemah sejak krisis finansial Asia 1998. Pelemahan ini mengindikasikan tekanan signifikan terhadap fondasi ekonomi nasional, terutama dari sisi eksternal.

Kondisi tersebut berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektor perbankan. Biaya impor yang meningkat mendorong inflasi, yang pada akhirnya menekan

daya beli dan menurunkan kualitas kredit rumah tangga serta UMKM. Di sisi lain, ketidakpastian nilai tukar meningkatkan risiko pasar dan risiko likuiditas dalam sistem perbankan.

Data OJK pada Januari 2025 mencatat bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) berada pada level 2,18%, sementara rasio kecukupan modal (CAR) tetap kuat di angka 24,86%. Pelemahan Rupiah juga mempertegas perlunya respons kebijakan yang terkoordinasi antara moneter dan fiskal. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 5,75% hingga Maret 2025 untuk menjaga stabilitas inflasi dalam kisaran target $2,5 \pm 1\%$. Di sisi fiskal, pemerintah memperluas belanja sosial, subsidi energi, dan insentif bagi sektor-sektor terdampak, termasuk properti dan UMKM.

Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut perlu dikaji lebih dalam agar tetap adaptif terhadap tekanan global dan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Permasalahan utama yang diangkat dalam jurnal ini adalah mengenai bagaimana pelemahan nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2025 telah memengaruhi kestabilan sektor perbankan serta kondisi makroekonomi Indonesia secara keseluruhan. Nilai tukar yang terus mengalami tekanan tidak hanya berimplikasi pada sektor eksternal, tetapi juga berdampak sistemik terhadap sektor keuangan domestik.

Pertama, pelemahan Rupiah secara langsung meningkatkan harga barang-barang impor, yang kemudian mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Kedua, nilai tukar yang tidak stabil memicu sentimen negatif di kalangan investor, terutama investor asing, yang menyebabkan capital outflow dan menekan cadangan devisa negara. Ketiga, sektor perbankan menghadapi tantangan tambahan dari sisi risiko kredit dan likuiditas akibat menurunnya kualitas pinjaman dan meningkatnya biaya dana. Selain itu, muncul pertanyaan kritis mengenai efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah melalui instrumen fiskal dan moneter.

Apakah intervensi di pasar valas serta kebijakan suku bunga acuan mampu meredakan tekanan eksternal? Apakah insentif fiskal dan subsidi yang dikeluarkan pemerintah cukup efektif menjaga daya beli dan mendorong stabilitas sektor riil? Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Apa saja dampak pelemahan Rupiah terhadap stabilitas perbankan di Indonesia selama tahun 2025? Bagaimana kebijakan moneter dan fiskal merespons tekanan pelemahan nilai tukar tersebut? Apa rekomendasi strategis yang dapat diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dalam jangka pendek dan menengah?

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab secara sistematis permasalahan yang telah dirumuskan, dengan pendekatan berbasis data dan teori ekonomi yang relevan. Adapun tujuan dari jurnal ini antara lain: Menganalisis dampak pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap stabilitas perbankan, dengan melihat indikator-indikator penting seperti NPL, CAR, LDR, dan eksposur risiko pasar berdasarkan laporan resmi OJK dan Bank Indonesia. Mengevaluasi efektivitas kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas makroekonomi selama periode pelemahan Rupiah, dengan fokus pada instrumen seperti BI-Rate, intervensi valas, subsidi energi, insentif fiskal, dan pengelolaan APBN. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat daya tahan sektor keuangan Indonesia terhadap volatilitas nilai tukar, termasuk strategi jangka panjang seperti digitalisasi perbankan, diversifikasi ekonomi, dan sinkronisasi kebijakan fiskal-moneter.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi makro dan kebijakan publik, serta menjadi masukan kebijakan yang aplikatif bagi otoritas moneter, fiskal, maupun sektor industri perbankan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi secara sistematis dan faktual, berdasarkan data yang tersedia. Pendekatan ini sesuai digunakan untuk mengkaji fenomena kompleks seperti pelemahan nilai tukar dan dampaknya terhadap sektor perbankan serta respons kebijakan ekonomi pemerintah.

Jenis penelitian ini tidak berfokus pada kuantifikasi data semata, tetapi lebih menekankan pada interpretasi mendalam terhadap dinamika ekonomi dan kebijakan, melalui analisis literatur, dokumen resmi, dan laporan statistik. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menghubungkan teori ekonomi dengan kondisi empiris yang tengah berlangsung, terutama selama tahun 2025 yang penuh ketidakpastian global dan domestik.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari berbagai lembaga resmi dan sumber ilmiah terpercaya. Adapun sumber data utama antara lain: Bank Indonesia (BI), melalui publikasi resmi seperti Laporan Stabilitas Sistem Keuangan, hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) dan statistik nilai tukar JISDOR. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui Statistik Perbankan Indonesia (SPI) edisi Januari 2025 yang memuat data terkini mengenai NPL, CAR, DPK, LDR dan indikator perbankan lainnya(ojk.go.id 2021) Badan Pusat

Statistik (BPS), terutama Berita Resmi Statistik Inflasi dan indikator harga konsumen. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, melalui dokumen resmi seperti Informasi APBN 2025, Kerangka Ekonomi Makro dan Strategi Fiskal 2025. Jurnal dan artikel akademik, baik dari Google Scholar, DOAJ, maupun jurnal nasional terindeks SINTA, seperti jurnal oleh Hidayat & Rahmawati (2019), jurnal kebijakan fiskal oleh UGM Press, dan publikasi ilmiah dari Universitas Airlangga. Media ekonomi terpercaya, seperti CNBC Indonesia, Bisnis.com, dan Reuters sebagai sumber data pendukung yang mencerminkan perkembangan aktual pasar dan sentimen pelaku ekonomi.

Pemilihan sumber data yang valid dan terkini bertujuan agar hasil analisis dalam penelitian ini bersifat objektif, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-komparatif, yaitu menganalisis data numerik dan naratif secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi sebelum dan sesudah pelemahan nilai tukar Rupiah serta membandingkan respons kebijakan yang diambil oleh otoritas fiskal dan moneter (Hasan 2022)

Data dianalisis melalui beberapa tahap berikut: Reduksi data : mengidentifikasi dan memilah data yang relevan dari total data yang terkumpul, termasuk memilih indikator utama yang mencerminkan stabilitas perbankan. Penyajian data : menyusun informasi dalam bentuk narasi, tabel, dan tren ekonomi untuk mempermudah pemahaman. Interpretasi : membandingkan data empiris dengan teori ekonomi yang relevan (misalnya: PPP, IRP, teori moneter dan fiskal). Penarikan kesimpulan : menyimpulkan keterkaitan antara pelemahan Rupiah, respon kebijakan, dan dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan dan ekonomi nasional.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh, faktual, dan bernilai akademik tentang kondisi perekonomian Indonesia tahun 2025 serta prospek kebijakan stabilisasi ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Stabilitas Perbankan

Fluktuasi nilai tukar Rupiah di tahun 2025 menjadi perhatian utama, bukan hanya bagi pelaku pasar, tetapi juga otoritas keuangan dan masyarakat luas (unair.ac.id 2024). Ketika Rupiah sempat menembus angka Rp16.640 per USD, hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai stabilitas sektor keuangan nasional. Bagi industri perbankan, tekanan nilai tukar

bukan sekadar tantangan eksternal, melainkan juga potensi risiko sistemik yang dapat menjalar ke dalam struktur intermediasi perbankan.

Salah satu dampak paling nyata dari pelemahan Rupiah adalah meningkatnya biaya dana serta risiko pada kredit valas. Bank-bank yang memiliki ekspose dalam mata uang asing harus menanggung risiko nilai tukar, terlebih jika pendapatan utama mereka dalam Rupiah. Hal ini diperparah jika sebagian nasabah memiliki kewajiban utang dalam bentuk valas—sehingga depresiasi Rupiah akan meningkatkan beban cicilan mereka, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas kredit (Yasinta Amalia and Rahmawati 2023)

Berdasarkan data dari OJK (2025), rasio Non-Performing Loan (NPL) per Januari 2025 tercatat sebesar 2,18%, yang secara statistik masih dalam batas wajar (di bawah ambang batas 5%) (ojk.go.id 2025). Namun, angka tersebut tetap perlu diwaspadai, mengingat potensi meningkatnya tekanan kredit di sektor-sektor yang rentan terhadap gejolak nilai tukar, seperti perdagangan internasional, konstruksi, dan industri pengolahan. Selain itu, tantangan likuiditas juga menjadi sorotan, terutama bagi bank yang mengalami mismatch antara aset dan kewajiban dalam mata uang yang berbeda.

Dari sisi permodalan, sektor perbankan Indonesia dinilai masih cukup kuat. Capital Adequacy Ratio (CAR) nasional berada di angka 24,86%, jauh di atas ambang minimum yang ditetapkan Basel III sebesar 8% dan OJK sebesar 12% (Departemen Komunikasi 2025). Artinya, secara umum perbankan memiliki buffer modal yang memadai untuk menahan tekanan nilai tukar dan volatilitas ekonomi jangka pendek. Namun, kekuatan modal ini tetap perlu diiringi dengan manajemen risiko yang ketat dan efisiensi operasional agar profitabilitas tetap terjaga.

Dalam situasi Rupiah melemah, indikator Loan to Deposit Ratio (LDR) juga perlu diperhatikan. Rasio yang terlalu tinggi menunjukkan agresivitas penyaluran kredit, sementara rasio terlalu rendah mencerminkan kurang optimalnya fungsi intermediasi. Hingga kuartal pertama 2025, LDR nasional berada di kisaran 82–86%, yang dianggap cukup seimbang dalam mendukung ekspansi kredit sekaligus menjaga likuiditas (ojk.go.id 2025).

Dampak Rupiah yang melemah juga terasa oleh segmen UMKM, yang sebagian besar menjadi nasabah inti bank-bank skala kecil dan menengah. Kenaikan harga bahan baku impor dan berkurangnya daya beli masyarakat menurunkan omzet UMKM, yang pada akhirnya berimbas pada kemampuan bayar kredit⁷. Ini bisa menjadi sumber tekanan NPL jika tidak segera direspons dengan restrukturisasi dan relaksasi kredit secara selektif.

Dengan mempertimbangkan seluruh indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sektor perbankan Indonesia masih cukup resilien, monitoring risiko kredit dan pasar

harus diperketat, khususnya di tengah fluktuasi global yang belum sepenuhnya stabil. Stabilitas perbankan bukan hanya soal kekuatan modal, tetapi juga soal kepercayaan pasar dan kemampuan untuk merespons krisis secara fleksibel dan terukur.

B. Kebijakan Moneter untuk Mengatasi Pelemahan Rupiah

Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, memiliki mandat untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah, baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar. Ketika Rupiah mengalami tekanan besar sepanjang awal 2025, respons yang diberikan oleh BI bersifat komprehensif dan menyesuaikan dinamika pasar domestik serta global (cnbcindonesia 2024).

Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah pengelolaan suku bunga acuan, yakni BI-Rate. Pada Maret 2025, BI memutuskan untuk menahan BI-Rate di angka 5,75%, setelah sebelumnya diturunkan pada Desember 2024 dari 6,25% sebagai bagian dari stimulus pertumbuhan (Departemen Komunikasi 2025). Langkah ini mencerminkan keseimbangan antara menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong pemulihan ekonomi pasca tekanan global dan pelemahan daya beli masyarakat.

Namun, kebijakan suku bunga saja tidak cukup. Dalam praktiknya, Bank Indonesia juga aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Tujuan dari intervensi ini bukan untuk mempertahankan nilai tukar pada level tertentu secara kaku, melainkan untuk mengurangi volatilitas berlebihan dan menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas Rupiah (kompasiana.com 2023).

Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter BI, Edi Susianto, menjelaskan bahwa intervensi dilakukan hampir setiap hari untuk menjaga persepsi pasar, terutama saat tekanan terjadi akibat aliran modal asing keluar dan penguatan Dolar AS (cnbcindonesia 2024). Dalam kondisi seperti ini, stabilitas menjadi prioritas utama, karena jika ekspektasi pelaku pasar tidak dikendalikan, pelemahan Rupiah bisa menjadi lebih dalam akibat aksi spekulatif.

Selain itu, BI juga memperkuat kebijakan makroprudensial, terutama melalui mekanisme Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). KLM mendorong bank untuk menyalurkan kredit ke sektor prioritas dengan imbal balik pengurangan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM). Langkah ini tidak hanya menjaga likuiditas sistem perbankan, tetapi juga menstimulus penyaluran kredit produktif di tengah tekanan ekonomi.

Upaya lain yang dilakukan adalah penguatan komunikasi kebijakan. BI secara rutin mengumumkan arah kebijakan moneter melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan. Strategi ini penting untuk membangun transparansi dan kredibilitas di mata pelaku pasar.

Pasar keuangan sangat sensitif terhadap sinyal kebijakan; jika komunikasi tidak konsisten, hal ini bisa memicu ketidakpastian yang memperparah depresiasi nilai tukar (Departemen Komunikasi 2025).

Secara keseluruhan, kebijakan moneter yang diambil BI pada tahun 2025 menunjukkan kombinasi antara tindakan jangka pendek (intervensi dan pengelolaan likuiditas) dan langkah jangka menengah (penguatan instrumen struktural seperti KLM). Respons yang cepat dan terukur menjadi kunci dalam menghadapi gejala eksternal yang tak dapat dikendalikan sepenuhnya, seperti kenaikan suku bunga global dan tensi geopolitik dunia.

Namun demikian, efektivitas kebijakan moneter tidak bisa berdiri sendiri. Dalam kondisi seperti ini, koordinasi yang erat dengan kebijakan fiskal sangat dibutuhkan, agar bauran kebijakan dapat saling menguatkan, bukan saling menetralkan. Ini akan dibahas lebih lanjut pada subbagian berikutnya.

C. Kebijakan Fiskal untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi

Di tengah tekanan eksternal yang berasal dari pelemahan Rupiah dan perlambatan pertumbuhan global, peran pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal menjadi sangat krusial. Bila kebijakan moneter lebih difokuskan pada pengendalian inflasi dan kestabilan nilai tukar, maka kebijakan fiskal berperan dalam menjaga daya beli masyarakat, melindungi kelangsungan usaha sektor produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara yang terarah (“Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025,” n.d.).

Melalui APBN 2025, pemerintah mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Fokus anggaran diarahkan pada penguatan perlindungan sosial, subsidi energi, pengembangan UMKM, dan investasi dalam infrastruktur dasar. Strategi ini dirancang untuk meredam dampak langsung dari depresiasi Rupiah terhadap konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi domestik.

Salah satu kebijakan fiskal yang paling dirasakan adalah pemberian subsidi energi, khususnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan LPG. Subsidi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi yang lebih tinggi akibat naiknya harga komoditas impor yang dibayar dalam Dolar AS (kemenkeu.go.id 2025). Tanpa subsidi yang cukup, gejala nilai tukar bisa langsung diterjemahkan ke dalam lonjakan harga bahan pokok, yang sangat membebani masyarakat berpendapatan rendah.

Selain subsidi, pemerintah juga menggelontorkan insentif fiskal dalam bentuk keringanan pajak, PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan, dan tambahan kuota KPR subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

(MBR)(kemenkeu.go.id 2012). Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjaga konsumsi, tetapi juga menysasar pemulihan sektor properti yang sempat tertekan oleh suku bunga tinggi dan pelemahan daya beli.

Sektor UMKM juga mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah menyalurkan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan langsung tunai untuk pelaku usaha mikro(cnbcindonesia 2024). UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, tetapi mereka sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar karena banyak di antaranya mengandalkan bahan baku impor. Jika tidak dibantu, pelemahan Rupiah bisa mendorong banyak usaha mikro gulung tikar.

Dari sisi pengelolaan utang, pemerintah tetap menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan fiskal. Meski defisit APBN diproyeksikan melebar, strategi pembiayaan lebih diarahkan ke sumber-sumber dalam negeri melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah dan penarikan pinjaman yang selektif dari luar negeri(kemenkeu.go.id 2012). Langkah ini bertujuan mengurangi tekanan terhadap Rupiah dan menjaga kestabilan portofolio utang negara.

Namun, kebijakan fiskal ekspansif seperti ini juga mengandung tantangan. Risiko defisit anggaran yang tinggi dan meningkatnya rasio utang terhadap PDB perlu dikendalikan agar tidak memicu krisis kepercayaan pasar. Untuk itu, transparansi dan akuntabilitas fiskal menjadi semakin penting, terutama di tengah pengawasan investor terhadap kondisi keuangan negara(“Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025,” n.d.).

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal tahun 2025 diposisikan sebagai bantalan ekonomi dalam menghadapi tekanan nilai tukar. Namun, seperti halnya kebijakan moneter, efektivitasnya akan jauh lebih optimal jika diiringi oleh sinkronisasi lintas kebijakan, termasuk kebijakan struktural yang mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang seperti hilirisasi industri, digitalisasi UMKM, dan penguatan produksi dalam negeri.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah sepanjang tahun 2025 telah memberikan tekanan yang cukup besar terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama pada sektor perbankan dan daya beli masyarakat. Nilai tukar yang sempat menyentuh Rp16.640 per USD mencerminkan volatilitas eksternal yang serius, diperparah oleh ketidakpastian global dan arus keluar investasi asing. Dampak langsung dari pelemahan Rupiah terlihat pada kenaikan harga barang impor, peningkatan inflasi, dan penurunan

konsumsi rumah tangga. Di sektor perbankan, meskipun rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) tetap tinggi di angka 24,86%, risiko kredit dan likuiditas tetap meningkat, terutama pada sektor-sektor yang rentan seperti UMKM dan industri padat impor². Rasio Non-Performing Loan (NPL) tercatat 2,18%, masih dalam ambang aman namun menunjukkan tren naik. Kebijakan moneter Bank Indonesia menunjukkan respons yang cepat dan adaptif, antara lain melalui penyesuaian BI-Rate, intervensi pasar valas dan DNDF, serta penguatan instrumen makroprudensial. Di sisi lain, kebijakan fiskal pemerintah difokuskan pada peningkatan belanja sosial, subsidi energi, dan insentif fiskal untuk menjaga daya beli dan melindungi sektor produktif. Keduanya menunjukkan pola koordinasi yang cukup baik melalui forum-forum seperti FKSSK.

DAFTAR PUSTAKA

- bi.go.id. 2025. *“Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).”* Bi.Go.Id. March 2025.
- cnbcindonesia. 2024. *“Efek Rupiah Melemah Hingga Daya Beli Anjlok, Bisnis UMKM Menjerit!”* Cnbcindonesia. 2024.
- Departemen Komunikasi. 2025. *“BI-Rate Tetap 5,75%: Mempertahankan Stabilitas, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Siaran Pers.”* Bi.Go.Id. March 19, 2025.
- Hasan, Muhammad. 2022. *Perumusan Masalah Dalam Penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif.*
- “Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.”* n.d. Accessed March 31, 2025. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf?ext=.pdf>.
- kemenkeu.go.id. 2012. *“Strategi Pemerintah Kelola Utang Negara.”* Kemenkeu.Go.Id. August 2012.
- . 2025. *“Peran subsidi dan intensif fiskal dalam pemulihan ekonomi.”* Kemenkeu.Go.Id. March 2025.
- kompasiana.com. 2023. *“Intervensi bank sentral di pasar valas.”* Kompasiana.Com. December 12, 2023.
- ojk.go.id. 2021. *“Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025.”* Ojk.Go.Id. February 18, 2021.
- . 2025. *“Statistik Perbankan Indonesia - Januari 2025.”* Ojk.Go.Id. March 2025.
- unair.ac.id. 2024. *“Nilai Rupiah Melemah Terhadap Dolar, Ini Dampaknya Menurut*

Ekonom UNAIR.” Unair.Ac.Id. April 2024.

Yasinta Amalia, Nur, and Rafika Rahmawati. 2023. “Analisis Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Dengan Menggunakan Metode Value at Risk (VAR) Pada Bank Muamalat Indonesia.” *At-Tamwil: Journal of Islamic Economics and Finance* 2 (2): 84–95. <https://doi.org/10.33558/attamwil.v2i2.8017>.

Setiawan, F., Guritmo, C., & Zunaidi, A. (2025). Assessing financial metrics and Sharia Healthcare stock return amid Indonesia’s market volatility. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 15(2), 105–120. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v15i2.105-120>

Lailatun Nikmah, Nelly Rizka Tri Wahyuni, Weka Nur Kharisma, Arif Zunaidi, Optimizing Liquidity Management in Islamic Banks: A Risk and Shariah Compliance Perspective. *Syari’ah Economics*, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 16-41, aug. 2025. <https://doi.org/10.36667/se.v9i1.2223>.

Siti Wasitoh, Arif Zunaidi, Ning Purnama Sariati, (2025) *DIGITAL BANKING: Meningkatkan Keunggulan Bersaing*. Malang : Intrans Publishing

Siti Mufidatul Azizah, Chofifah Indah Parawansyah, Fitrotul Bitu Aulia Putri, Reviby Adam Nazalla Dhias, & Arif Zunaidi. (2025). The Role of Labor Law on Business Sustainability and Workers’ Welfare in Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26569>